

Pengaruh Inflasi, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara (2001-2021)

Anggrini Manullang¹ Elisabeth Silaban² Rian Pasaribu³ Putri Sari M. J. Silaban⁴

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: liritiovani@gmail.com¹

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks. Penanggulangan kemiskinan tetap menjadi agenda dan prioritas dalam pembangunan nasional. Berbagai kebijakan, strategi serta kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah demi untuk mengatasi masalah kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Inflasi, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Utara periode 2001-2021. Penelitian ini menggunakan data yang di dapat dari Badan Pusat Statistik. Data penelitian terdiri dari variabel dependen yaitu Kemiskinan dan variabel independen yaitu Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia dan Realisasi A, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah selama periode 2001-2021. Alat atau metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan metode Least Square (LS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi memiliki pengaruh positif dan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Sedangkan, Pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin, Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin. Hasil Uji F menunjukkan, Inflasi, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh atau secara bersama-sama signifikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di provinsi Sumatera Utara.

Kata Kunci: Jumlah Penduduk Miskin, Inflasi, Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah mendasar yang kerap muncul di negara-negara yang sedang berkembang maupun di negara miskin. Kemiskinan adalah di mana kondisi seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti tidak dapat menikmati standar kesehatan, standar pendidikan dan standar kehidupan yang layak. Di Indonesia kemiskinan menjadi isu yang sangat hangat hingga saat ini, belum ada yang bisa menghilangkan isu kemiskinan yang ada di Indonesia (Amalia, 2012). Menurut Maipita (2014) kemiskinan timbul dikarenakan adanya perbedaan kemampuan, kesempatan dan pendapatan. Kemiskinan juga menimbulkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan bagi orang miskin untuk melaksanakan kegiatan, seperti tidak mendapat akses pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, kemiskinan banyak terdapat di daerah terisolir dan pedalaman yang jauh dari pusat pemerintahan. Penduduk yang miskin di pedalaman di keranakan tertinggal dari berbagai aspek seperti, untuk melanjutkan pendidikan, mencari pekerjaan, untuk medapat perobatan, dan untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya yang disebabkan dari dirinya sendiri, keturunan, dan ada juga dari luar seperti lingkungan hidup, dan pemerintah.

Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi seluruh negara, terutama di negara berkembang. Hal ini disebabkan karena kemiskinan bersifat multidimensional yang memiliki arti kemiskinan mencakup berbagai aspek dan dimensi. Mencakup dimensi sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Dikarenakan kebutuhan manusia yang berbeda – beda maka kemiskinan

memiliki berbagai macam aspek, yaitu aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik, pengetahuan, dan ketrampilan. Sedangkan aspek sekunder yaitu berupa miskin akan jaringan sosial, sumber – sumber keungan, dan juga informasi. Masalah strategis yang juga dihadapi provinsi Sumatera Utara adalah masalah kemiskinan yang tinggi. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Sumatera Utara dari Tahun 2001 sampai dengan tahun 2021, data di atas menunjukkan bahwa kemiskinan di Sumatera Utara mengalami penurunan, namun masih relatif tinggi dan sempat mengalami kenaikan sehingga menimbulkan permasalahan ekonomi dalam kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara yang akan menimbulkan dampak negatif. Ada banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan, Pada dasarnya kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal sendiri merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu.

Inflasi merupakan fonemana terjadi harga barang–barang umum akan merangkak naik secara massif. Hal ini akan menjadi parah lagi apabila diikuti dengan tingginya tingkat pengangguran, saat ini pengangguran bukan hanya menjadi masalah ekonomi, melainkan juga menjadi masalah dibidang sosial dan politik. Dampak sosial dari pengangguran yang tinggi yaitu meningkatkan tingkat kriminalitas, baik perampokan, pencurian, serta perdagangan ilegal, hal ini dapat terjadi karena tututan hidup atau tuntutan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengangguran merupakan salah satu faktor yang sangat pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia. Salah satu unsur yang menunjukkan keadaa makmur dalam masyarakat adalah tingkat pendapatan. Pendapatan masyarakat mencapai maksimum apabila kondisi tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (full employment) dapat terwujud. Pengangguran akan menimbulkan efek mengurangi pendapatan masyarakat, dan hal tersebut akan mengurangi tingkat kemakmuran akan menimbulkan masalah lain yaitu kemiskinan (Sukirno,2010).

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi dicapai. Dalam perkembangannya alat indikator ini tidak saja berdasar pertumbuhan ekonomi tetapi jugamelibatkan seberapa tinggi tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. Walau demikian,pertumbuhan ekonomi merupakan alat indikator utama sebelum indikator lainnya. Inimenjelaskan mengapa pemerintah sering hanya menekankan tercapainya tingkat pertumbuhanekonomi yang tinggi tetapi mengabaikan indikator pembangunan lainnya, terlebih fakta yang terjadi di masyarakat. Seringkali, tingginya pertumbuhan ekonomi tidak menjangkau kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah (Kembar Sri Budhi, 2010).

Tabel 1. Data jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara (2001-2021)

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
2001	1.913.040	2012	1.400.400
2002	1.883.890	2013	1.416.400
2003	1.889.400	2014	1.360.600
2004	1.800.100	2015	1.508.140
2005	1.760.228	2016	1.452.600
2006	1.979.702	2017	1.326.600
2007	1.770.000	2018	1.291.900
2008	1.630.000	2019	1.260.500
2009	1.500.000	2020	1.356.700
2010	1.490.000	2021	1.273.070
2011	1.436.400		

Tabel 1 dapat dijelaskan bahwa tingkat kemiskinan pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2001 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 1.913.040 jiwa, tahun 2002 menurun menjadi 1.883.890 jiwa. Tahun 2003 mengalami kenaikan menjadi 1.889.400 dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2004 menjadi 1.800.100 jiwa. Tahun 2005 semakin mengalami penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 1.760.228 jiwa, sedangkan pada tahun 2006 naik lagi menjadi 1.979.702 jiwa. Pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara menjadi 1.770.000 jiwa dan pada tahun 2008 semakin menurun menjadi 1.630.000 jiwa. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara semakin menurun pada tahun 2009 menjadi 1.500.000 jiwa dan tahun 2010 menurun menjadi 1.490.000 jiwa. Dari tahun 2010 sampai pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara terus mengalami penurunan sehingga pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara menjadi 1.273.070 jiwa. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan meneliti "Pengaruh inflasi, pengangguran dan pengeluaran pemerintah terhadap jumlah penduduk miskin di provinsi Sumatera Utara".

Tinjauan Pustaka

Inflasi

Menurut Boediono (2001:161) inflasi adalah kecenderungan dari harga yang naik secara umum dan terus menerus. Kenaikan satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali kenaikan tersebut meluas dan mengakibatkan pada sebagian besar dari harga-harga barang lain. Jika inflasi mengalami fluktuasi, maka kegiatan perekonomian akan cenderung menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi. Dampak dari kenaikan inflasi menyebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Dikarenakan nilai riil pada mata uang mengalami penurunan. Menurut Sukirno (2004) inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi berbeda dari satu periode ke periode yang lain. Dan tingkat inflasi berbeda antara negara yang satu dengan negara yang lain. Dimana tingkatan inflasi itu dibagi menjadi tiga, pertama tingkat inflasi rendah yaitu dibawah 2 atau 3 persen. Kedua, tingkat inflasi moderat jika kenaikan harga dapat mencapai 4 sampai 10 persen, dan ketiga adalah tingkat inflasi yang serius, tingkat inflasi serius terjadi jika kenaikan mencapai tingkat puluhan atau ratusan persen dalam setahun.

Pengangguran

Menurut Sukirno bahwa pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi mereka belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Sementara menurut Kaufman dan Hotchkiss, pengangguran merupakan suatu ukuran yang dilakukan jika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetapi mereka sedang melakukan usaha secara aktif dalam empat minggu terakhir untuk mencari pekerjaan. Pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan dengan berbagai cara. Jika rumah tangga tersebut memiliki batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini sangat dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka pengangguran akan secara langsung mempengaruhi kemiskinan baik yang diukur dari sisi pendapatan (income poverty rate) maupun kemiskinan yang diukur dari sisi konsumsi (consumption poverty rate). Jika rumah tangga tersebut tidak menghadapi batasan likuiditas (yang berarti bahwa konsumsi saat ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan saat ini) maka peningkatan pengangguran akan menyebabkan peningkatan kemiskinan dalam jangka panjang, tetapi tidak terlalu berpengaruh dalam jangka pendek.

Pengeluaran Pemerintah

Badan Pusat Statistika berpendapat bahwa untuk mengukur kemiskinan dapat digunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan ini dihitung menggunakan Headcount Index dimana persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Jadi, dalam pendekatan ini bisa dikatakan bahwa kemiskinan di lihat sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari pengeluaran pemerintah yang tinggi pula, maka disinilah peran otonomi daerah, yang dapat memperdayakan potensi daerahnya masing-masing. Kebebasan pemerintah daerah dalam hal merencanakan keuangan daerah dan membuat kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kemajuan daerah dan untuk menunjang kemajuan daerah, Pemerintah daerah berhak mengalokasikan anggaran belanja daerah yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang di perlukan.

Hubungan Inflasi terhadap Kemiskinan

Teori Keynes mengatakan bahwa inflasi terjadi karena masyarakat memiliki permintaan melebihi jumlah uang yang tersedia. Proses perebutan pendapatan antargolongan masyarakat masih menimbulkan permintaan agregat (keseluruhan) yang lebih besar daripada jumlah barang yang tersedia, mengakibatkan harga secara umum naik. Dalam jangka pendek kenaikan inflasi menyebabkan pertumbuhan perekonomian, namun dalam jangka panjang tingkat inflasi yang tinggi dapat memberikan dampak yang buruk. Tingginya tingkat inflasi akan menyebabkan harga barang domestik relatif lebih mahal dibanding dengan harga barang impor. Masyarakat terdorong untuk membeli barang impor yang lebih murah dibandingkan barang domestik. Harga yang lebih mahal menyebabkan turunnya daya saing produk domestik menyebabkan barang impor naik. Kurang bersaingnya barang domestik menyebabkan rendahnya permintaan terhadap produk dalam negeri. Sejumlah perusahaan akan mengurangi produksi. Produksi berkurang berimbas kepada pengurangan pekerja kehilangan pekerjaannya. Hubungan antara inflasi dan kemiskinan dapat diterangkan dengan dua cara. Pertama, inflasi mengakibatkan nilai riil dari uang yang dipegang menjadi turun. Ketika harga meningkat, uang untuk membeli lebih sedikit (daya beli menjadi turun). Kedua, inflasi mengakibatkan bunga riil yang diperoleh dari menyimpan uang di bank menjadi turun sehingga daya beli menjadi turun. Turunnya daya beli ini mengakibatkan masyarakat menjadi lebih miskin dari sebelumnya. Oleh sebab itu inflasi mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan.

Hubungan Pengangguran terhadap Kemiskinan

Pengaruh buruk dari pengangguran terhadap kemiskinan menurut Sukirno, (2004) adalah pendapatan masyarakat berkurang karena tidak memiliki pekerjaan yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Kesejahteraan masyarakat semakin menurun karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Bila pengangguran yang terjadi di suatu negara sangat buruk, hal ini dapat berdampak pada kekacauan politik, sosial, menimbulkan efek yang buruk bagi kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi perluasan kesempatan kerja antara lain: perkembangan jumlah penduduk dan angkatan kerja, pertumbuhan ekonomi dan kebijaksanaan mengenai perluasan kesempatan kerjanya sendiri. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting disamping sumber alam, modal dan teknologi. Tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan, sebagai pelaku pembangunan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang begitu nyata dan dekat dengan lingkungan, bahkan

masalah ketenagakerjaan dapat menimbulkan masalah baru baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menyebabkan rendahnya pendapatan yang selanjutnya memicu munculnya kemiskinan. Oleh karena itu pengangguran mempunyai pengaruh positif dan signifikan mempengaruhi kemiskinan.

Hubungan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan

Adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi berasal dari pengeluaran pemerintah yang tinggi pula, maka disinilah peran otonomi daerah, yang dapat memperdayakan potensi daerahnya masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menggali secara optimal sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat memungkinkan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan tantangan pembangunan yang bersifat multidimensional dan merupakan bagian yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian utama pembangunan nasional dan daerah, terutama sejak diberlakukannya undang-undang tentang pemerintahan daerah. Hal tersebut seharusnya dijadikan momentum dan peluang untuk mewujudkan desentralisasi pembangunan yang sensitif terhadap persoalan lokal. Berarti memecahkan masalah kemiskinan secara tidak langsung memecahkan banyak persoalan sosial yang dihadapi oleh pemerintah daerah.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara khususnya data tahun 2001 sampai dengan tahun 2021. Data utama yang diperlukan adalah semua variabel yang diteliti meliputi inflasi, pengangguran, pengeluaran pemerintah, dan jumlah penduduk miskin. Jenis data yang digunakan adalah data panel yaitu gabungan time series. Data time series dari tahun 2001-2021. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda untuk menganalisis hubungan antara variabel dependen dan independen. dalam analisis ini dilakukan dengan bantuan program Eviews adapun rumusnya sebagai berikut:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_{1t} + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + e_t$$

Y = Tingkat Kemiskinan (Variabel Terikat/Dependen)

β_0 = Konstanta/Intersep

β_1, β_2 , dan β_3 = Koefisien Regresi Parsial

X1 = Inflasi (Variabel Bebas/Independen 1)

X2 = Pengangguran (Variabel Bebas/Independen 2)

X3 = Pengeluaran Pemerintah (Variabel Bebas/Independent 3)

E = Variabel gangguan/Error

T = 1,2,3,... 21 (time series 2001-2021)

Uji Statistik Parsial (Uji-t)

Uji t statistik merupakan pengujian yang bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam mempengaruhi variabel dependen, Dengan pengujian hipotesis sebagai berikut : Jika t statistik > dari t tabel : H0 diterima dan Jika t statistic < dari t tabel : H0 ditolak. Untuk mengetahui apaakah variabel bebas dengan menggunakan kriteria pengujian (apabila t hitung > t tabel) maka variabel bebas berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat.

Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Menurut Ghozali (2012) uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Pada pengujian ini juga menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05. Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: Jika nilai signifikan $< 0,05$ (α) atau $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka hipotesis H_0 ditolak dan H_1 diterima (koefisien regresi signifikan). Berarti secara simultan variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikan $> 0,05$ (α) atau $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka hipotesis H_0 diterima dan H_1 ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Berarti secara simultan variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis koefisien determinasi berfungsi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas (X_1, X_2, X_3, \dots) terhadap variabel terikat (Y) baik secara simultan maupun parsial. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011).

Uji Asumsi Klasik

Menurut Widarjono (2013) metode OLS harus memenuhi asumsi-asumsi tertentu yaitu menghasilkan estimator linier tidak bias dengan varian yang minimum Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Uji asumsi klasik adalah analisis yang dilakukan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linier ordinary least square (OLS) terdapat masalah asumsi klasik. Dalam penelitian menggunakan empat uji asumsi klasik yaitu Uji Normalitas, Uji multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji t hanya akan valid jika residual yang akan didapatkan mempunyai distribusi normal. Ada beberapa metode yang bisa digunakan untuk mendeteksi apakah residualnya mempunyai distribusi normal atau tidak. Dalam uji normalitas ada 2 metode yaitu: (1) melalui histogram, dan (2) uji yang dikembangkan oleh Jarque-Bera (J-B) (Widarjono, 2009).

Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas berfungsi untuk menguji apakah model regresi yang digunakan terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Multikolinieritas diuji dengan cara melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan tolerance. Tolerance mengukur variabel independen yang terpilih (ada dalam model regresi) namun tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Masing-masing variabel independen, jika nilai $VIF < 10$, maka dapat disimpulkan data bebas dari gejala multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Uji heteroskedastisitas yang menggunakan metode White. White mengembangkan sebuah metode yang tidak memerlukan asumsi tentang adanya normalitas pada variabel gangguan (Widarjono, 2013).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dapat dikatakan terjadi masalah autokorelasi (Ghozali, 2011). Menurut Gujarati (2012) uji autokorelasi merupakan adanya korelasi di antara anggota observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berikut adalah hasil regresi untuk mengetahui pengaruh Inflasi, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Utara dengan menggunakan model LS (Least Squares). Hasil regresi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Dependent Variable: MISKIN
Method: Least Squares
Date: 12/02/23 Time: 08:01
Sample: 2001 2021
Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1810706.	152370.7	11.88356	0.0000
INFLASI	403.1456	6679.208	0.060358	0.9526
PENGANGGURAN	0.046393	0.239829	0.193441	0.8489
PENGELUARAN	-44.46116	7.720233	-5.759044	0.0000
R-squared	0.772691	Mean dependent var		1557127.
Adjusted R-squared	0.732578	S.D. dependent var		237100.2
S.E. of regression	122611.4	Akaike info criterion		26.44107
Sum squared resid	2.56E+11	Schwarz criterion		26.64003
Log likelihood	-273.6312	Hannan-Quinn criter.		26.48425
F-statistic	19.26269	Durbin-Watson stat		0.676633
Prob(F-statistic)	0.000010			

$$\text{Penduduk Miskin} = C + b_1 \text{ Inflasi} + b_2 \text{ Pengangguran} - b_3 \text{ Pengeluaran Pemerintah} + e$$

$$\text{Penduduk Miskin} = 1.810.706 + 403.1456 + 0.046.393 - 44.461.16 + e$$

Keterangan:

1. Konstanta sebesar 1.810.706 Artinya jika inflasi, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah adalah nol, Jumlah Penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara sebesar 1.810.706 jiwa.
2. Koefisien regresi inflasi sebesar 403.1456 Artinya jika inflasi meningkat sebesar 1 persen, maka Jumlah Penduduk miskin Sumatera Utara **meningkat** sebesar 403.1456 jiwa.
3. Koefisien regresi Pengangguran sebesar 0.046.393 Artinya jika Pengangguran meningkat sebesar 1 persen, maka Jumlah Penduduk miskin Sumatera Utara **meningkat** sebesar 0.046.393 jiwa.
4. Koefisien regresi Pengeluaran Pemerintah sebesar - 44.461.16 Artinya jika Pengeluaran Pemerintah sebesar 1 Miliar, maka Jumlah Penduduk miskin Sumatera Utara **menurun** sebesar 44.461.16 jiwa.

Uji Statistik Parsial (Uji t)

1. Hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Inflasi mempunyai hasil perhitungan angka nilai t hitung = **1,8626** > t table = **1,73961**; dan nilai prob. 0.9526 untuk 2 arah, maka untuk nilai prob 1 arah sebesar **0,4763** (lebih Besar dari 0,05), maka Ho diterima. Artinya Tidak Terdapat Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.
2. Hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Inflasi mempunyai hasil perhitungan angka nilai t hitung = **1,8626** > t table = **1,73961**; dan nilai prob. 0,8489 untuk 2 arah, maka untuk nilai prob 1 arah sebesar **0,42445** (lebih Besar dari 0,05), maka Ho diterima. Tidak Terdapat Pengaruh Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

3. Hasil pengolahan data diketahui bahwa variabel Inflasi mempunyai hasil perhitungan angka nilai t hitung = **1,8626** > t table = **1,73961**; dan nilai prob. 0,000 untuk 2 arah, maka untuk nilai prob 1 arah sebesar 0 (lebih Kecil dari 0,05), maka Ha diterima. Artinya Terdapat Pengaruh Negatif Pengeluaran Pemerintah Terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

Uji Hipotesis Simultan (Uji F)

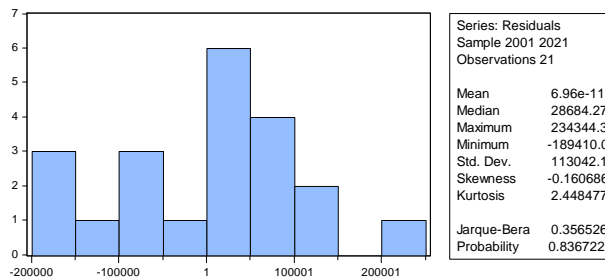
Hasil uji simultan ini diperoleh nilai F hitung = **19,262** > F table = **3,20**; dan nilai prob. 0,000 (lebih kecil dari 0,05), maka Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan Pengaruh inflasi, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara.

Koefisien Determinasi (R²)

R-squared	0.772691	Mean dependent var	1557127.
Adjusted R-squared	0.732578	S.D. dependent var	237100.2
S.E. of regression	122611.4	Akaike info criterion	26.44107
Sum squared resid	2.56E+11	Schwarz criterion	26.64003
Log likelihood	-273.6312	Hannan-Quinn criter.	26.48425
F-statistic	19.26269	Durbin-Watson stat	0.676633
Prob(F-statistic)	0.000010		

Nilai R squared sebesar 0.772691 Artinya variabel Inflasi, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah memberikan kontribusi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di provinsi Sumatera Utara sebesar 77,26 persen, sedangkan sisanya 22,74 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

**Uji Asumsi Klasik
 Uji Normalitas**



Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa hasil uji normalitas menghasilkan Prob. 0,836 > 0,05, maka Ho diterima. Artinya tidak ada pelanggaran normalitas data pada model penelitian tersebut.

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors
 Date: 12/02/23 Time: 08:04
 Sample: 2001 2021
 Included observations: 21

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	2.32E+10	32.43103	NA
INFLASI	44611818	4.199026	1.562266
PENGANGGURAN	0.057518	18.21626	1.108433
PENGELUARAN	59.60199	4.937920	1.692101

Dari hasil tabel di atas terlihat bahwa nilai VIF < 10 (Inflasi = 1,562; Pengangguran = 1,108; Pengeluaran Pemerintah = 1.692) Artinya tidak ada pelanggaran multikolinearity data pada model penelitian tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
 Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	2.295136	Prob. F(3,17)	0.1145
Obs*R-squared	6.053637	Prob. Chi-Square(3)	0.1090
Scaled explained SS	2.873142	Prob. Chi-Square(3)	0.4116

Test Equation:
 Dependent Variable: RESID^2
 Method: Least Squares
 Date: 12/02/23 Time: 08:07
 Sample: 2001 2021
 Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.72E+10	1.71E+10	2.178575	0.0437
INFLASI	-1.32E+09	7.48E+08	-1.758826	0.0966
PENGANGGURAN	-5718.987	26863.45	-0.212891	0.8339
PENGELUARAN	-2212374.	864748.4	-2.558402	0.0204

R-squared	0.288268	Mean dependent var	1.22E+10
Adjusted R-squared	0.162669	S.D. dependent var	1.50E+10
S.E. of regression	1.37E+10	Akaike info criterion	49.69377
Sum squared resid	3.21E+21	Schwarz criterion	49.89273
Log likelihood	-517.7846	Hannan-Quinn criter.	49.73695
F-statistic	2.295136	Durbin-Watson stat	1.893107
Prob(F-statistic)	0.114461		

Berdasarkan pada tabel hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan nilai Prob. 0,109 > 0,05, maka H_0 diterima. Artinya tidak ada pelanggaran autokorelasi data pada model penelitian tersebut.

Pembahasan

Pengaruh Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Inflasi berpengaruh positif terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Dari hasil pengujian diketahui bahwa inflasi terbukti berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin sehingga hipotesis awal dalam penelitian ini terbukti. Hasil ini sesuai dengan teori dan hipotesis bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat terjadi dikarenakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara naik turun setiap tahunnya. Sehingga jika terjadi inflasi, jumlah penduduk miskin tidak akan terpengaruh negatif dikarenakan mereka memiliki daya beli. Meningkat dan menurunnya penduduk miskin juga terjadi dikarenakan urbanisasi di Provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Pengangguran berpengaruh positif terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Dari hasil pengujian diketahui bahwa pengangguran terbukti berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin sehingga hipotesis awal dalam penelitian ini terbukti. Hasil ini sesuai dengan teori dan hipotesis bahwa pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat terjadi dikarenakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara menurun setiap tahunnya. Sehingga jika terjadi pengangguran, jumlah penduduk miskin tidak akan terpengaruh negatif dan signifikan. Otomatis jika pengangguran meningkat maka jumlah penduduk miskin juga meningkat. Meningkatnya penduduk miskin juga terjadi karena banyaknya pengangguran di provinsi Sumatera Utara.

Pengaruh Pengeluaran Terhadap Jumlah Penduduk Miskin

Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap variabel jumlah penduduk miskin. Dari hasil pengujian diketahui bahwa pengeluaran pemerintah terbukti berpengaruh

negatif terhadap jumlah penduduk miskin sehingga hipotesis awal dalam penelitian ini terbukti. Hasil ini sesuai dengan teori dan hipotesis bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Hal ini dapat terjadi dikarenakan jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Utara menurun setiap tahunnya. Sehingga jika terjadi pengeluaran pemerintah, jumlah penduduk miskin akan terpengaruh negatif dan signifikan. Karena untuk mengatasi penduduk miskin maka pemerintah mengatasinya dengan otonomi daerah yang berfokus membantu penduduk miskin. Otomatis jika pengeluaran meningkat maka jumlah penduduk miskin tidak akan meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data dalam penelitian tentang pengaruh Inflasi, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Kemiskinan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Inflasi memiliki pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Dimana jika inflasi meningkat maka otomatis jumlah penduduk miskin juga meningkat. Pengangguran memiliki pengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin. Dimana jika pengangguran meningkat maka otomatis jumlah penduduk miskin juga meningkat. Pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Dimana jika pengeluaran pemerintah meningkat maka otomatis jumlah penduduk miskin tidak akan meningkat. Inflasi, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Jumlah Penduduk Miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina Herawati, E. D. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2012-2021. *Jurnal Ekonomi Integra*, 173-181.
- Desrini Ningsih, P. A. (2018). Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomika*, 53-61.
- Dra. Diah Retnowati, M., & Harsuti, S. M. (2015). Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Ekonomi*, 608-618.
- Iqbal Salsabil, W. R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pendidikan, Kesehatan Dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 15-24.
- Joshua Valdo Padang, T. O. (2023). Analisis Pengaruh Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (Ipm) Dan Realisasi Apbd Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado Tahun 2007 – 2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 1-12.
- Leli Safitri, M. E. (2019). Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Penduduk Dan Investasi Terhadap Kemiskinan Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 842-851.
- Nengah Rai Narka Suda Pratama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 651-680.
- Putri Sari M.J. Silaban, I. P. (2020). Analisis Pengaruh Pdrb Dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka Di Sumatera Utara Periode 2003-2019. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, 127-132.
- Rezki Mardiatillah, M. P. (2021). Pengaruh Pengangguran Dan Inflasi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Selatan Tahun 2015-2019. *Kinerja*, 279-287.
- Rollin Prassetyo Lumowa, A. T. (2021). Pengaruh Pengangguran, Pengeluaran Pemerintah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005-2019. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 60-68.